

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adanya reformasi di Indonesia telah merubah sistem ketatanegaraan bangsa hampir secara keseluruhan di setiap aspek kehidupan. Tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) menuntut pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan di segala aspek. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (*good government governance*), reformasi keuangan pemerintah menghasilkan paket undang-undang yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara. Undang – Undang tersebut antara lain Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Halim, 2017).

Lahirnya Undang - Undang tersebut menghasilkan Peraturan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan keuangan seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam Menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Simanjuntak, 2005). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan standar akuntansi yang di dalamnya mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN dan APBD (Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017). Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 maka standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki dasar hukum sendiri dalam penerapannya.

Menurut Indrawati (2018), Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu basis akuntansi dimana semua transaksi ekonomi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi tersebut terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas dan setara kas. Keberhasilan pemerintahan pusat maupun daerah dalam penerapan basis akrual ditunjukkan dengan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kualitas laporan keuangan (Zalni, Monoarfa, & Panigoro, 2022). Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual banyak hal yang perlu diperhatikan dengan persiapan yang terstruktur. Menurut Saprudin (2017) beberapa persiapan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, dan komitmen organisasi. Dengan komitmen dan integritas yang tinggi dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang transparan dan akuntabel.

Untuk bisa menerapkan pencatatan keuangan secara akrual dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia adalah kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan kompetensi yang memadai. Pemerintah dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas apabila SDM yang menyusun laporan keuangan telah

menguasai SAP. Dalam islam telah dijelaskan tentang kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qurán Surah Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua Wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya”

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan dalam praktik penerapan kebijakan publik (Insani dalam Yaqin dan Jatmiko, 2018). Menurut penelitian Sa'diyah dan Yuhertiana (2021) sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Putri dan Silviana (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam penelitian Erawati dan Kurniawan (2018) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP. Setiyawati et al (2018) mengatakan bahwa buruknya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia secara umum disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang menguasai sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya

kompetensi SDM yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena sumber daya manusia merupakan indikator penting dalam organisasi untuk kemajuan dan menjadi faktor penentu bagi keefektifan kegiatan dalam sebuah organisasi.

Komitmen organisasi merupakan bagian terpenting dalam mengembangkan suatu organisasi. Menurut Zalni dkk (2022), komitmen organisasi memiliki kaitan antara karyawan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tempat mereka bekerja yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian Sa'diyah dan Yuhertiana (2021), menyebutkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Putri dan Silviana (2017) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Disisi lain penelitian Pratiwi dkk (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Zalni dkk (2022) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Semakin meningkatnya tingkat komitmen organisasi maka akan meningkatkan tingkat penerapan SAP berbasis akrual yang lebih baik.

Selain faktor sumber daya manusia dan komitmen organisasi, keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual di pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan teknologi informasi (Subhi & Yuhertiana, 2021). Teknologi informasi terdiri dari tiga indikator, yaitu ketersediaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan

programmer (*brainware*). Menurut penelitian Zalni dkk (2022), menyebutkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara teknologi informasi terhadap tingkat penerapan SAP berbasis akrual. Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Supra (2016) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam penelitian Puspitarini dkk (2017) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta dapat memperbaiki kualitas informasi keuangan daerah yang diberikan kepada masyarakat.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini menarik untuk diteliti. Penelitian sebelumnya mengenai penerapan SAP berbasis akrual meneliti bagaimana dalam kesiapannya, karena saat ini pemerintah sudah mengharuskan basis akrual dan telah menjalani SAP berbasis akrual, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapannya. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut menunjukkan bahwa adanya hasil yang tidak seragam pada penelitian – penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini mereplikasi penelitian Talitha dan Aswar (2021) yang menguji kualitas sumber daya manusia, pelatihan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual dan dikembangkan dengan penelitian Subhi dan Yuhertiana (2021) yang menguji peran sumber daya manusia dan teknologi informasi pada penerapan

SAP berbasis akrual, serta penelitian Deswati Supra (2016) yang menguji pengaruh tingkat Pendidikan, pelatihan, dan kualitas teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris peran sumber daya manusia terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
2. Untuk menguji secara empiris komitmen organisasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
3. Untuk menguji secara empiris peran teknologi informasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teori diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan peran sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pihak akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

- b. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan ide - ide baru untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah atau instansi yang menghadapi permasalahan yang sama.

3. Manfaat untuk pengambilan kebijakan

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan memperhatikan faktor - faktor internal,

khususnya terkait dengan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan saran, pemikiran, dan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pertimbangan pengambilan keputusan.